

Perkembangan Universal Health Coverage di Provinsi Bali *Development Of Universal Health Coverage in Bali Province*

Sendy Dwi Pertiwi^{1*}, Fitria Nur Rahmi^{2*}, Siswoyo^{3*}

¹Puskesmas Kaliwates, Jember

²RSUD dr. H. Koesnadi, Bondowoso

³RSUD dr. Soebandi, Jember

Corresponding author: Sendy Dwi Pertiwi

name and affiliation: Puskesmas Kaliwates, Jember

E-mail: 212520102046@Unej.ac.id

Abstract

Objectives: *The achievement of UHC (Universal Health Coverage) has attracted WHO's attention, especially in developing countries like Indonesia. JKN-KIS participants in Indonesia currently reach 83%, while in Bali Province by 2022 it has reached 98.01%. As many as 1.8% of Balinese people who are not registered for JKN-KIS are workers under the auspices of micro-scale companies and community groups who use other insurance and do not want to use JKN.*

Methods: *The author conducted observations and discussions in analyzing the development of UHC in Bali Province which was conducted at the Bali Provincial Health Office. The analysis was conducted descriptively. Results: Based on observations made at the Bali Provincial Health Office, they received an explanation of the various efforts that have been made by the Bali Provincial Government. The Krama Bali Sejahtera Program is an effort by the Bali Provincial Government to increase the achievement of UHC by providing health insurance to all Balinese people and providing additional health services outside the benefit packages guaranteed by JKN-KIS. Efforts to accelerate the achievement of UHC are not only the task of the government, but require support from all private parties, including. The government's difficult task besides increasing the achievement of UHC is to improve the quality of JKN services.*

Conclusions: *Acceleration efforts in accelerating the achievement of UHC cannot be done by the government alone. All parties, both private and government, must participate in improving the achievement of UHC. The difficult task for the government in addition to improving the achievement of UHC is also to improve the quality of services in the health sector, both infrastructure and medical personnel as well as equal access to health for the community. Because achieving UHC will be meaningless when health services do not improve.*

Keywords: *Universal Health Coverage, Balinese Prosperity*

Received: Jun 14, 2023 Revised: Jul 19, 2023 Accepted: Agt 12, 2023

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Kesmasindo Publisher

PENDAHULUAN

Hasil capaian UHC (*Universal Health Coverage*) menjadi pokok perhatian di dunia terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam ulang tahun yang ke – 70 WHO yang beranggotakan 194 negara Kembali menegaskan perlunya Universal Health Coverage (UHC). UHC, menurut WHO adalah menjamin semua orang memounyai akses kepada layanan Kesehatan promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif, disamping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunaanya [1]

Lebih lanjut tentang UHC, WHO memaparkan bahwa [1] :

- UHC bukan jaminan kesehatan tak terbatas atau pengobatan gratis
- UHC bukan semata tentang pembiayaan kesehatan, namun mencakup pengelolaan semua komponen sistem Kesehatan
- UHC bukan hanya terbatas pada pembiayaan layanan Kesehatan dasar minimal, namun harus meningkatkan cakupan pada saat sumber daya sudah makin baik.
- UHC bukan hanya mencakup kesehatan perorangan, namun mengupayakan kesehatan masyarakat termasuk promosi kesehatan, penyediaan air bersih, pengendalian nyamuk , dsb
- UHC bukan hanya menngeni peningkatan kesehatan, namun juga Langkah menuju ekuiti, prioritas pembangunan, serta inklusi dan kohesi sosial (CID).

Peserta JKN- KIS saat ini sudah mencapai 226,7 juta jiwa atau sekitar 83 % dari toral penduduk Indonesia [3]. Pemerintah melakukan dukungannya untuk pencapaian UHC melalui berbagai rugulasi yang mewajibkan seluruh warga negara Indonesia terdaftar menjadi bagian dari program JKN-KIS. Selain itu pihak BPJS sendiri juga proaktif dalam melakukan advokasi masyarakat melalui berbagai segmen.

Di Provinsi Bali sendiri pencapaian UHC terbilang sangat baik, tahun 2018 dengan presentase 85, 22 % sedangkan sampai tahun 2022 telah mencapai 98,01 %. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan tujuan untuk :

1. Memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh Krama Bali (Jana Kertih)
2. Memberikan pelayanan kesehatan tambahan di luar paket manfaat yang dijamin oleh JKN

Dengan agenda kegiatan adalah memantapkan pelaksanaan JKN-KBS melalui kegiatan :

- Menjamin keberlangsungan kepesertaan JKN KBS dengan mengalokasikan anggaran berupa dana sharing Kab/Kota melalui BKK
- Melaksanakan manfaat tambahan JKN -KBS

Diantaranya adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan tradisional dan komplementer di fasilitas Kesehatan
- b. Transportasi rujukan dari dan ke tempat tinggal pasien atau tempat kejadian menuju faskes khusus untuk kasus gawat darurat
- c. Sistem penanganan keluhan terintegrasi antara faskes, Dinas dan BPJS Kesehatan
- d. *Visum et repertum*
- e. Transportasi jenazah
- f. Terapi hiperbarik

Uniknya di Provinsi Bali sebanyak 1,8 % warga yang belum mendapat jaminan Kesehatan adalah para pekerja yang bekerja di bawah naungan perusahaan atau badan usaha lainnya terutama yang berskala mikro. Bagi mereka membayar BPJS Kesehatan akan memberatkan beban dari perusahaan padahal sudah diamanatkan oleh Undang Undang no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa perusahaan wajib memberikan jaminan Kesehatan kepada pekerjanya melalui program JKN.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan observasi dan diskusi dalam menganalisis perkembangan UHC di Provinsi Bali yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Analisis dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penemuan di lapangan, UHC di propinsi Bali sudah tercapai sebanyak 98 persen, sebuah pencapaian yang luar biasa dimana rata rata seluruh capaian UHC di seluruh kabupaten tercapai di atas 90%, bahkan di kabupaten Jembrana sendiri sudah tercapai 99,8 %. Dimana sejak 1 Maret 2023 sebanyak 324.953 jiwa penduduk Jembrana telah menjadi bagian dari program JKN dimana 44% penduduk tercover melalui segmen PBI daerah yang dibayarkan pemerintah kabupaten dan sisanya melalui PBI pusat dan segmen lain termasuk dari pember kerja maupun mandiri. Ternyata untuk menarik minat dari masyarakat memakai masuk dalam program JKN pemerintah menambahkan 13 program tambahan . berhasilnya program ini tidak lain juga karena sector ekonomi yang menghasilkan pendapatan yang besar bagi kabupaten Jembrana sehingga pemerintah dan para pemberi kerja dapat memberikan jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan para pekerjanya.

Inpres no 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, mengamanatkan BPJS Kesehatan, kementerian/Lembaga dan seluruh pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar bersinergi dan berupaya secara optimal untuk

memastikan seluruh penduduk dilindungi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dan propinsi Bali telah menjadi contoh bagi daerah lain agar dapat mencapai UHC. Dengan pendapatan yang besar dari berbagai sector terutama pariwisata, mereka dapat membiayai sector penduduk rentan ke dalam program lain, serta melalui regulasi pemerintah propinsi Bali berhasil menggerakkan para pemberi kerja untuk memberikan jaminan Kesehatan dan kerja kepada para kerjanya.

Di propinsi Bali upaya upaya yang dilakukan sejalan dengan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu pemerintah daerah didorong untuk lebih mengambil peran terhadap penduduk rentan ke BPJS Kesehatan antara lain, penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar. Kedua senantiasa melalui regulasi yang ada memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali. Ketiga, pemerintah daerah diharapkan memberikan asistensi kepada pekerja informal ke program JKN. Keempat, BPJS Kesehatan harus tetap meningkatkan kualitas terhadap mutu dan layanan kepada seluruh peserta.

Tetapi pada kenyataannya di provinsi Bali sendiri ternyata selain dari para pekerja informal yang belum mendapat jaminan Kesehatan karena pemberi kerjanya tidak bisa memberikan jaminan Kesehatan dan kecelakaan kerja. Ada juga masyarakat yang memakai asuransi lain yang bukan BPJS dan tidak ingin memiliki asuransi BPJS.

KESIMPULAN

Upaya akselerasi dalam percepatan pencapaian UHC, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Semua pihak baik swasta dan pemerintah harus turut serta untuk meningkatkan capaian UHC. Tugas berat bagi pemerintah selain meningkatkan capaian UHC juga adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dimiliki di bidang Kesehatan, baik infrastruktur maupun

tenaga medis serta pemerataan akses Kesehatan bagi masyarakat. Karena pencapaian UHC tidak akan berarti Ketika pelayanan Kesehatan tidak membaik.

Selain itu pemerintah daerah hendaknya dapat berpikir panjang bagaimana dapat meningkatkan pendapatan daerahnya sehingga dapat memfasilitasi masyarakat rentan sebagai anggota dari peserta PBI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Chris&Hik.(2018). Pengertian Universal Health Coverage. Diakses <https://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/pengertian-universal-health-coverge-uhc>
- [2]. Humas.2021.Kunci Capai UHC : Komitmen Pemerintah Lindungi Penduduk.diakses <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2021/2128/Kunci-Capai-UHC-Komitmen-Pemerintah-Lindungi-Penduduk>
- [3]. Dinas Kesehatan Provinsi Bali.(2021). *Profil Kesehatan Provinsi Bali 2021*
- [4]. Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2023). Kejar Target 98% UHC pada tahun 2024, Wapres instruksikan Empat Langkah Strategis diakses pada https://www.setneg.go.id/baca/index/kejar_target_98_uhc_pada_tahun_2024_wapres_instruksikan_empat_langkah_strategis
- [5]. Laura Gabriella S. (2021). *Analisis Perkembangan Universal Health Coverage Negara Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID 19*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- [6]. Pemerintah Kabupaten Jember. (2023). Capai UHC 99,8 % Jember Dikanal Penghargaan UHC Award 2023 dari Mendagri Tito Karnavian diakses <https://jemberkab.go.id/index.php?module=detailberita&id=4255>